



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/DJU/SK/HM.02.3/1/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2019**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP);
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pekara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pekara di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara terdiri atas Kesekretariatan, Divisi Kajian dan Divisi Teknis Aplikasi.

KETIGA ...

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara mempunyai tugas:

1. Kesekretariatan:

- a. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Satuan Tugas Sistem Informasi Perkara (SATGAS SIPP);
- b. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
- c. Menghimpun *review* atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan publikasi terhadap *Frequently Asked Question (FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
- e. Memfasilitasi pertemuan antara anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara;

2. Divisi Kajian:

- a. Melakukan *review* atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui media yang telah ditentukan;
- c. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap implementasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

3. Divisi Teknis Aplikasi:

- a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Pengadilan Tingkat Negeri dan Pengadilan Tinggi

melalui ...

- melalui media yang telah ditentukan;
- b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berdasarkan laporan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - d. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - e. Membuat dan mengembangkan tools/alat bantu monitoring dan evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk mendukung register elektronik;
 - f. Melakukan Koordinasi dengan Divisi Kajian dalam membuat laporan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Padang, Banda Aceh, Surabaya, Jambi, Makassar, Tanjungkarang, Medan, Denpasar, Mataram, Bengkulu, Yogyakarta, Bandung, Kupang, Ambon, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak;
8. Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Sengkang, Sidoarjo, Kualatungkal, Bengkayang, Rantau, Bontang, Dataran Hunipopu, Yogyakarta, Madiun, Sungguminasa, Praya, Oelamasi, Stabat, Lembata, Mungkid, Kabupaten Kediri, Sei Rampah, Jakarta Barat, Pasaman Barat;
9. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 10/DJU/SK/HM.02.3/1/2019
TANGGAL : 15 JANUARI 2019

DAFTAR NAMA
SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
(SATGAS SIPP)

| NO | NAMA | JABATAN | POSISI DALAM TIM |
|----------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Dr. Herri Swantoro,S.H.,M.H. | Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | Pembina |
| 2. | Zahlisa Vitalita,S.H | Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum | Ketua Satgas |
| 3. | Yayat Sudrajat, S.H.,M.H | Kasubdit Statistik dan Dokumentasi | Sekretaris 1 Satgas |
| 4. | Lies Khadijah,S.H.,M.H. | Kasubdit Bimbingan dan Monitoring | Sekretaris 2 Satgas |
| 5. | Candra, S.H | Kasubdit Tata Kelola | Koordinator |
| 6. | Achmad Basyari,S.E. | Kepala Seksi Pelayanan Peradilan | Kesekretariatan |
| 6. | Leni Cahyani,S.H.,M.H. | Kepala Seksi Sarana Pengadilan | Kesekretariatan |
| 7. | Misra Dewita,S.H.,M.H. | Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring | Kesekretariatan |
| 7. | Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom | Kepala Seksi Statistik | Kesekretariatan |
| 8. | Rosalia Puspa K, S.E,M.H | Kepala Seksi Tata Persidangan | Kesekretariatan |
| 9. | Reni Kartini,S.H. | Staf Seksi Pelayanan Peradilan | Kesekretariatan |
| 10. | Marthinalova Noll,S.Kom. | Staf Seksi Statistik | Kesekretariatan |
| 11. | Renita Dwi Astuti,S.E. | Staf Seksi Bimbingan I | Kesekretariatan |
| 12. | Dodon Angin Wiyono,S.Kom | Pegawai Tidak Tetap pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum | Kesekretariatan |
| DIVISI KAJIAN | | | |
| 13. | Heru Pramono,S.H.,M.Hum. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin | Koordinator |
| 14. | James Butar Butar SH., M.Hum | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta | Anggota |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|------------|
| 15. | Agoeng Rahardjo,S.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung | Anggota |
| 16. | Dr. Albertina Ho,S.H.,M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan | Anggota |
| 17. | Saurasi Silalahi,S.H.,M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang | Anggota |
| 18. | Tony Pribadi S.H., M.H | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru | Anggota |
| 19. | Sirande Palayukan,S.H.,M.Hum. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar | Anggota |
| 20. | Dwi Tomo,S.H,M.Hum | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar | Anggota |
| 21. | Eka Budhi Prijanta,S.H.,M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar | Anggota |
| 22. | Harini, S.H.,M.H. | Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya | Anggota |
| 23. | Eko Aryanto,S.H., M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat | Anggota |
| 24. | Rizkiansyah,S.H. | Hakim Pengadilan Negeri Sekayu | Anggota |
| 25. | Mustamin,S.H.,M.H. | Hakim Pengadilan Negeri Sengkang | Anggota |
| 26. | Zulfikar Berlian, S.H | Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat | Anggota |
| 27. | Ferdian Permadi, S.H | Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah | Anggota |
| 28. | Dirgha Zaki Azizil, S.H., M.H | Hakim Pengadilan Negeri Wangi-wangi | Anggota |
| 29. | Adi Wahyono,S.H. | Panitera Pengadilan Tinggi Kupang | Anggota |
| DIVISI TEKNIS APLIKASI | | | |
| 30. | Jhon Hendriansyah,S.H. | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal | Koodinator |
| 31. | Marisa Eka Putra,S.T.,M.Eng. | Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkayang | Anggota |
| 32. | Dona Panambayan,S.H.,M.H. | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Rantau | Anggota |
| 33. | Ita Masyita, S.Kom | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Bontang | Anggota |

| | | | |
|-----|----------------------------------|--|---------|
| 34. | Fransesco Palang Ama,S.T. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu | Anggota |
| 35. | Yenny Viky Effendy ST, SH.,M.Eng | Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Yogyakarta | Anggota |
| 36. | Aris Susilo,S.T. | Pranata Komputer Ahli Muda Pengadilan Negeri Madiun | Anggota |
| 37. | Zeno Dani Kuncoro, S.T | Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Bengkulu | Anggota |
| 38. | Bambang Andi Saputro, S.Kom | Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sungguminasa | Anggota |
| 39. | Imam Maxudi, S.Kom | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Praya | Anggota |
| 40. | Oktein Josepus Susak, SH.MH | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi | Anggota |
| 41. | Raja Muda Arif,S.Kom. | Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Stabat | Anggota |
| 42. | Agustinus Evan Bangun M, S.Kom | Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Mungkid | Anggota |
| 43. | Andik Eko F, S.Kom | Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri | Anggota |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



HERRI SWANTORO